

**Judul** : Tersangka suap di KPK: Taufik Masih Anggota DPR  
**Tanggal** : Selasa, 19 Februari 2019  
**Surat Kabar** : Bisnis Indonesia  
**Halaman** : 12

## ► TERSANGKA SUAP DI KPK

# Taufik Masih Anggota DPR

JAKARTA — Politisi Partai Amanat Nasional yang menjadi tersangka di Komisi Pemberantasan Korupsi, Taufik Kurniawan, masih tercatat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Taufik diketahui belum mengajukan pengunduran diri karena berbagai alasan.

Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar mengatakan bahwa kendati sudah tidak lagi menduduki jabatan sebagai Wakil Ketua DPR, posisi Taufik Kurniawan sebagai anggota DPR belum bisa diganti.

Menurutnya, setidaknya ada beberapa kriteria yang menyatakan bahwa seorang legislator dapat diganti yaitu karena terjerat hukum yang sudah berkekuatan hukum tetap, mengundurkan diri, dan meninggal dunia.

"Selagi beliau belum mengundurkan diri, aturan di tata tertibnya, memang itu beliau masih tercatat," ujarnya saat menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Gedung KPK, Senin (18/2).

Status Taufik Kurniawan masih sebagai tersangka penerima

suap pembahasan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) yang masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Kebumen tahun anggaran 2016.

Sementara itu, selepas memeriksa Indra Iskandar sebagai saksi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita dokumen risalah rapat terkait dengan pembahasan anggaran DAK untuk Kabupaten Kebumen.

Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan bahwa penyidik telah memeriksa Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar sebagai saksi terkait dengan kasus dugaan suap Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik pada perubahan APBN tahun anggaran 2016 untuk Kabupaten Kebumen.

### DOKUMEN RISALAH

Dalam kasus itu, KPK telah menetapkan politisi Partai Amanat Nasional (PAN) yang juga mantan Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan sebagai tersangka.

"Penyidik KPK melakukan penyitaan sejumlah dokumen terkait dengan risalah rapat dan

pembahasan anggaran tersebut," kata Febri, Senin (18/2).

Adapun setelah menjalani pemeriksaan, Indra mengaku memang sejumlah dokumen risalah laporan terkait dengan pembahasan Badan Anggaran (Banggar) di DPR telah disita oleh KPK. Terdapat sebanyak delapan dokumen yang disita oleh lembaga antirasuah itu.

Ketika disinggung terkait dengan adanya pembahasan khusus mengenai DAK Kebumen dalam dokumen tersebut, dia tidak menjawabnya secara pasti. Indra mengaku bahwa hal tersebut hanya bisa disampaikan oleh KPK.

"Saya kira kalau menyangkut materi substansi itu di penyidik. Saya rasa saya enggak boleh bicara, ya. Saya hanya teknis karena saya hanya selaku sekjen, tentunya kan memfasilitasi semua persidangan-persidangan di semua alat kelengkapan dewan."

Menurut Indra, KPK pada pemeriksaan dirinya ingin memastikan apakah benar dokumen-dokumen itu dibuat oleh para anggota Banggar di DPR. (Ilham Budhiman)

Isi di luar tanggung jawab percetakan PT Aksara Grafika Pratama